

**UPAYA PEMERINTAH MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DESA DANDANG
KEC. SABBANG SELATAN KAB. LUWU UTARA)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Istitut Agama Islam Negeri

Oleh:

M. FIRMANSYAH

NIM:15.03.02.0042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO 2019**

**UPAYA PEMERINTAH MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DESA DANDANG
KEC. SABBANG SELATAN KAB. LUWU UTARA)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Istitut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

Oleh:

M. FIRMANSYAH

NIM:15.03.02.0042

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat, M.H**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Firmansyah

NIM : 15.0302.0042

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, September 2019

Yang membuat pernyataan

M. FIRMANSYAH
NIM 15.0302.0042

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul: “**Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara**” yang ditulis oleh **M.Firmansyah, NIM. 15.03.02.0042**, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Sabtu 21 September 2019 M**, yang bertepatan pada tanggal **21 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 21 September 2019 M
21 Muharram 1441 H

Tim Penguji :

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekertaris Sidang (.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Penguji I (.....)
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI Penguji II (.....)
5. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H Pembimbing I (.....)
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H Pembimbing II (.....)

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol, M. Ag.
NIP 19691104 199403 1 004

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, September 2019

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr.wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. Firmansyah

NIM : 15.0302.0042

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi : "Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal" (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.
NIP.19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, September 2019

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. Firmansyah

NIM : 15.0302.0042

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi : "Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal" (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Penguji II

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, September 2019

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: M. Firmansyah
NIM	: 15.0302.0042
Prodi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi	: "Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal" (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, September 2019

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. Firmansyah

NIM : 15.0302.0042

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi : “Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal” (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP.19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena berkat Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal” (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kubupaten Luwu Utara)** Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku, Ayahanda M.Suprin AR, serta Ibunda Minaria, dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali serta sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini dan juga senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan kampus IAIN Palopo beserta jajarannya yaitu:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo dan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, selaku Wakil Rektor I,dan Dr. Ahmad Syarief, SE.MM selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, S.Ag. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Nirwana Halide S.HI., M.HI. selaku Pembimbing II yang tiada hentinya selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga Skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Penguji I dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Penguji II yang memberikan kritik dan masukan dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Dosen dan staf fakultas Syariah yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi pada Penulis.
7. Kepada Kepala Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara beserta Staf dan jajarannya yang telah mengijinkan Penulis

melaksanakan penelitian dan membantu Penulis ketika melakukan penelitian.

8. Seluruh keluarga tercinta yang tulus dan ikhlas merawat, mendidik, serta memotivasi penulis dalam meraih cita-cita.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Tata negara angkatan 2015 yang bersama-sama telah banyak melewati suka duka selama kuliah di IAIN Palopo.
10. Sahabat-sahabatku Aisrah Sarah S.E, Andi Tasnia Putri Yanti S.IP, Prada Jusfrianto Jum, Wahyudi, Usman, Switno, Djihan Patarioja S.H, Dian S.H, Angriani S.H, Lucky Nurhalim, James Kumila, Miftahul khair, dan Alfian Basri S.H yang selalu memberikan motivasi bagi Penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
11. Keluarga Besar PMII khususnya Cabang Palopo dan Komisariat PMII IAIN Palopo yang telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi Penulis dari awal masuk pendidikan dasar hingga penyelesaian studi..

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala perbuatan kita dan bernilai amal yang baik di sisi-Nya Aamiin. Dan akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi acuan bagi kemajuan bangsa ini. Aamiin.

Palopo, 21 September 2019

Penulis

M.FIRMANSYAH
NIM : 15.03.02.0042

DAFTAR ISI

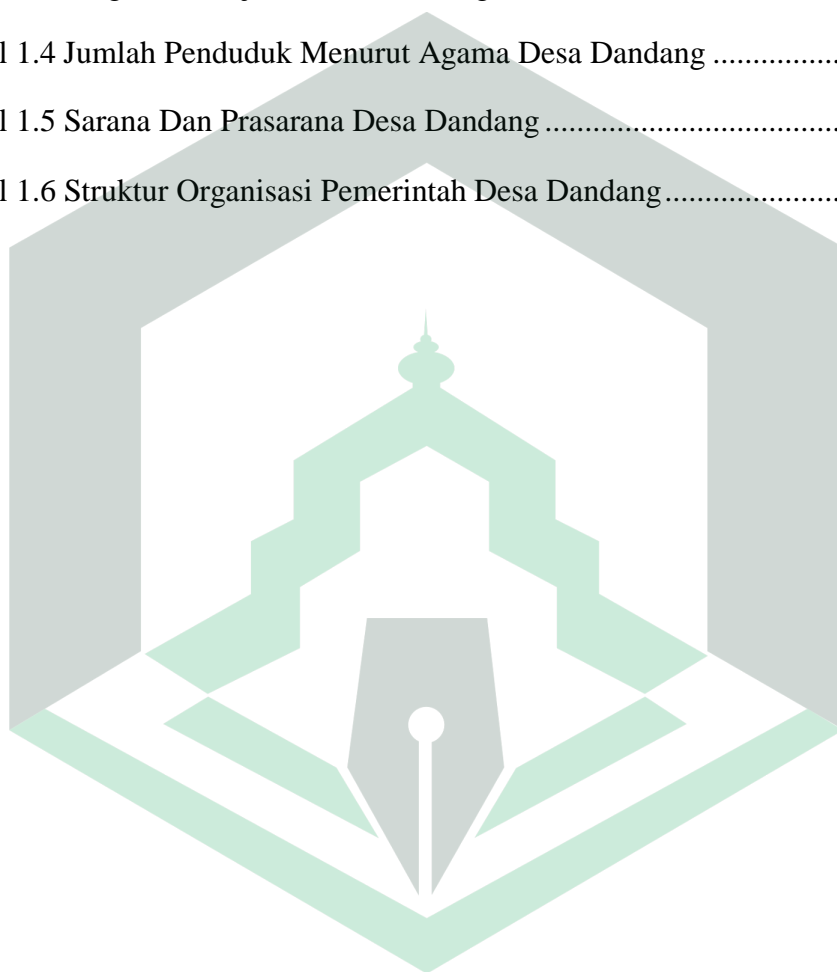
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	vi
PERSETUJUAN PENGUJI	vii
NOTA DINAS PENGUJI I.....	viii
NOTA DINAS PENGUJI II	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TIJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
B. Tinjauan Teoritis	14
1. Upaya	14
2. Partisipasi	15
3. Pembangunan Masyarakat	19
C. Kajian Emprik.....	24
D. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian.....	30

D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	33
B. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	42
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	47
D. Tinjauan Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	51
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan	36
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dandang	37
Tabel 1.3 Tingkat Pekerjaan Desa Dandang	38
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Dandang	39
Tabel 1.5 Sarana Dan Prasarana Desa Dandang	40
Tabel 1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dandang	41



ABSTRAK

Nama : M. Firmansyah
Nim : 15 0302 0042
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H

Judul : “Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal” (Studi Kasus Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara).

Kata Kunci : Upaya Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan

Desa sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat perlu untuk ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, karena pembangunan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. Yang subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Dandang, Aparat Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Teknik yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang dapat dikatakan cukup baik, dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Pembinaan kepada Masyarakat, melakukan kegiatan pembangunan melibatkan Masyarakat, melakukan kegiatan melibatkan Musrembang melibatkan Masyarakat.

Implikasi penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah sebagai pemegang kendali dalam membangun kepercayaan diri masyarakat dan langkah-langkah atau cara-cara lain untuk mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pembangunan serta Pemerintah memberikan ruang besar kepada Masyarakat dalam memberikan pendapat ataupun kritikan kepada Pemerintah. Sehingga proses pembangunan berjalan sebagai semestinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peran dari Pemerintah adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Disadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan.¹

Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.²

Wilayah Desa terdapat pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas rumah tangga Desanya dan menyelenggarakan

¹ Wayati, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna*. Skripsi Universitas Haluoleo, Tahun 2016.h.1

² Wulandari Sri.SI, *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017. h. 1

tugas dari Pemerintahan Daerah.³ Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (1) diatut empat tugas utama kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Pembinaan kepada masyarakat Desa
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat Desa. Sehingga seorang Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik. Peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan public menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Paradigma pelayanan publik yang dilakukan oleh Kepala Desa dirubah dari yang “Dilayani” menjadi “Melayani”. Sikap Kepala Desa yang cenderung lebih dingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pemimpin Desa.

Seorang pemimpin memiliki pembantu yang biasa disebut dengan staf. Staf merupakan seorang atau sekompok orang yang saling bekerja sama membantu pemimpin yang memiliki keahlian, tanggung jawab dan professional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari hal tersebut seharusnya sebagai pelaku penyelenggara pemerintahan, Kepala Desa mampu bersikap professional dalam menjalankan tugas dan kewenangan tanpa kata melayani secara berbeli-belit, lambat dan penuh dengan formalitas belaka.

³ Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 7 No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program dan pelayanan publik kurang merespon terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas.

1. Para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan bukan menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Budaya suatu pemimpin yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik.
2. Terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat. Kondisi yang mendukung para birokrat yang sekian lama selalu tunduk kepada pimpinan politis dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh sebab itu, disamping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Mekanisme *checks and balance* harus terus dikembangkan diantara lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, dan tidak kalah penting seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarkan aspirasi mereka kepada birokrasi publik.

Fenomena-fenomena dimasa lalu telah melahirkan konsep pembangunan yang sedikit berbeda di masa sekarang. Pembangunan yang cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas kebawah (*top - down*) kini mulai diminimalkan, dan muncul konsep pembangunan lain yang

menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), yang bersifat *bottom up* dan menggunakan pendekatan lokalitas yaitu pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar.

Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Guna merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma

pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat. Pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat, dalam menumbuh-kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya. Dengan kata lain, bagaimana mengkondisikan agar pembangunan menjadi bagian integral dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai subjek pembangunan yang dominan menentukan keberhasilan pembangunan.

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa. Selain itu juga diperlukan kesadaran dari partisipasi aktif dari seluruh masyarakat karena peran dan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan, tanpa peran dan partisipasi dari masyarakat maka pembangunan desa tidak akan bisa berjalan dengan maksimal sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an surah An-Nisa/04:59 dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka sendiri.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴

Penjelasan ayat Q.S.An-Nisa/04:59 ialah bagaimana dalam suatu kelompok harus memiliki pemimpin dan diperintahkan untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya begitu pula kepada pemimpin yang sah yang menjadi tangan Tuhan dimuka bumi selama program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bertentangan dengan Al quran dan sunnah rasul. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masyarakat diwajibkan untuk selalu taat dan patuh terhadap pemimpin yang sah dan ditunjuk bersama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan Desa di Desa Dandang.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2014. h.87

Sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat di Desa Dandang saat ini telah dibangun berbagai infrastruktur seperti gedung posyandu, gedung masjid, gedung SD, gedung SMP, gedung SMK, balai Desa, kantor Desa, selokan air dan jalan usaha tani.

Partisipasi masyarakat Desa Dandang rata-rata bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk materi dan uang tunai. Intensitas dan bentuk partisipasi masyarakat di atas dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti dibidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring, dan pemanfaatan hasil/pengawasan. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kesadaran/kemauan, pendidikan, dan penghasilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia.⁵

Indonesia dalam konteks global adalah Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, kebudayaan dan sangat potensial dijadikan sebagai pemarkasan oleh Negara-negara maju. Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih hidup dengan menyerap budaya-budaya asing sementara mereka melupakan budaya dan kekayaan negerinya sendiri. Juga diakui bahwa kemunduran negeri ini karena masyarakat telah melupakan budayanya. Kearifan lokal sebagai kekuatan sekaligus kekayaan bangsa dianggap sebagai solusi untuk menguatkan bangsa dari

⁵ Melis, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (studi di Desa Wawolesea Lasolo Kabupaten Konawe Utara)*. Skripsi Universitas Halu Oleo, 2016.h.2-4.

segi tantangan globalisasi. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Di Indonesia yang kita kenal sebagai Nusantara kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat rasional.

Sebagai contoh, hampir disetiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etoskerja, dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah atau dan pribahasa).

Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari segi generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif. Secara faktual dapat kita saksikan bagaimana kearifan lokal yang sarat kebijakannya dan filosofi hidup nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang makin pragmatis.

Bangsa Indonesia perlu disatukan untuk menjadikan sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Pemerintahan yang baik pasti akan membawa ke penyelenggaraan Negara yang baik pula. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia tidak dapat diperintah begitu saja sebab Indonesia terdiri atas berbagai suku dan budaya yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, perlu merumuskan system pemerintahan yang baik dan tepat untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

Pemerintahan yang baik untuk rakyat Indonesia tidak mestinya harus disamakan secara merata. Hal ini disebabkan oleh adanya beragam corak budaya di seluruh pelosok tanah air. Perbedaan budaya itu menjadikan setiap masyarakat menafsirkan pemerintahan secara berbeda. Bahkan, ada beberapa kelompok yang tidak menerima aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah.

Wilayahnya Negara Indonesia yang sangat luas, merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi pemimpin di Indonesia. Bukan hanya itu, keberagaman budaya yang ada disetiap suku di Indonesia merupakan salah satu permasalahan tersendiri untuk menyeragamkan aturan pemerintahan Indonesia. Selain itu, Pola pikir masyarakat Indonesia juga sangat beragam sehingga selalu pula muncul penafsiran yang beragam dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan disetiap daerah. Menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mudah. Kadang-kadang peraturan yang dianggap baik dan berhasil disuatu Daerah, justru tidak disrespon dengan baik di Daerah lain.⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul:

“Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal” (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara).

⁶ Dr. Patta Rappanna, S.E, M.Si., *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Makassar: SAH MEDIA, 2016), hal. 2-3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan kearifan Lokal terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini :

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
3. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat teoritis dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian ilmu pengetahuan khususnya bidang pembangunan Desa.

b. Bagi peneliti, sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang peneliti dapat diperkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa khususnya pemerintah Desa dandang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang khususnya pada pembangunan Desa di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

b. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak lainnya yang ingin melakukan penelitian yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wayati dengan penelitian yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna”.⁷ Berdasarkan hasil yang disimpulkan, adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada Peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna.
- b. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat.
- c. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Martiana Dwi Rahayu berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan

⁷ Wayati, *Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna*. Sripsi Universitas Haluoleo, 2016.

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”.⁸ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

a. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang kegiatan masyarakat. Pembangunan yang terjadi selama anggaran tahun tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, drainase, gorong-gorong, taman kampung, kios kampung, dan perawatan bangunan sarana umum.

b. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi.

c. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang khususnya pada pembangunan Desa di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Ridho Nugroho”Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) di Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.”⁹ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu:

⁸ Rahayu Dwi Martina, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi Universitas Bandar Lampung, 2018.

⁹ Mochammad Ridho Nugroho, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

- a. Penelitian terdahulu ini lebih berfokus pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- b. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan Desa.
- c. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang khususnya pada pembangunan Desa di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Upaya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Berdasarkan makna dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian dengan kata ikhtiar dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹⁰

Menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil

¹⁰ Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2008. hal 1784

sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2. Partisipasi

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta. Partisipasi nampaknya telah menjadi sebuah keharusan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Suksesnya pembangunan disuatu Desa, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat Desa.

Suryono berpendapat bahwa partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.¹²

Menurut Mardikanto, Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.¹³ Dari penjelasan diatas

¹¹ W.J.S, Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1991. hal.574

¹² Aditya Bagus Kurniawan, *Upaya Pemmerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandu Kecamatan Sangkulirang kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Administrasi Negara, Vol.3, No.5.2015 h.1608

¹³ Wahyuddin, *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.h.9

tentang partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi sangat diperlukan dalam pembangunan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada nantinya.

Bentuk partisipasi menurut Ndraha meliputi:

- a. Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai suatu titik awal dalam perubahan social.
- b. Peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
- c. Peran serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- d. Peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁴

Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah dalam septiyasa, adalah:

- a. Partisipasi buah pikiran.
- b. Partisipasi tenaga.
- c. Partisipasi harta benda.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran.

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.1990.h.103

e. Partisipasi sosial.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka bentuk-bentuk partisipasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan saran/ide atau pemikiran dalam perumusan dan pembuatan keputusan serta sumbangan dana dan tenaga dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Adapun faktor – faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi, Slamet dalam Theresia menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk masyarakat berpartisipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.¹⁶

Sementara itu, Najib dalam Tanuwujaya menjelaskan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:

- a. Siapa penggagas partisipasi, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat.

¹⁵ Laksana Nuring Septyasa, *Bentuk- bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Kebijakan dan Manejemen Publik, Vol.1 No.1. 2018.h.6

¹⁶ Aprilia Theresia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabet, 2014.h207

- c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung mengerahui permasalahan, konsisi dan kebutuhan daerah masyarakat dibandingkan pihak luar.
- d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya, jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih muda dilaksanakan.
- e. Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- f. Politik, pemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keragaman dan demokratis.
- g. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengolahan pembangunan (terintegrasi dalam sistem pemerintahan di daerah).
- h. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.
- i. Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.

- j. Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama.
- k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan Pemerintah (forum warga).¹⁷

3. Pembangunan masyarakat

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Adapun beberapa penjelasan dari pembangunan, yaitu:

- a. Pembangunan adalah mendirikan (mengadakan gedung/bangunan, jalan dan lain-lainnya).¹⁸
- b. Menurut Katz dalam Yuwono, Pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai .¹⁹
- c. Pembangunan mengandung arti suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh, atau menjadi lebih matang atau Desa, lebih maju atau lebih terorganisasi.²⁰

¹⁷ Fransiska Tanuwijaya, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya*. Jurnal kebijakan dan Menejemen Publik, Vol.4 No.2018.h.7

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, (Balai Pustaka: Jakarta 2007), h.103

¹⁹ Teguh Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang:lyapps Diponegoro University. 2001, h.47

Berdasarkan dari beberapa penjelasan tentang pembangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses mendirikan, yang dipandang baik dan berharga serta lebih maju atau lebih terorganisasi.

Pembangunan dalam islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh di manfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai Islam. Ada pun konsep pembangunan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.²¹

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dimana partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan program. Menurut Nasdian, partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai “sadar” akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi hasil pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dimana partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk

²⁰ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana,2015), h.77

²¹ Ummi Nurul Hidayah, *Analisis Strategi Pogram Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)*. Skripsi UIN walisongo Semarang, 2018.h.47

terjun langsung berpartisipasi/ikut serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.²²

Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata “*syraka*”. *Syraka*, yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam bahasa Inggris masyarakat disebut dengan “*society*” yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan.²³ Macam-macam pengertian masyarakat menurut definisi para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Emile Durkheim, Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya.
- b. Menurut Karl Marx, Masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.
- c. Menurut M. J. Herkovits, Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.
- d. Menurut J. L. Gillin dan J. P. Gillin, Masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama.

²² Yudhiansyah Eka Saputra, *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. (Kasus: Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau). Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2016. h.3-4

²³ Artikel Siana, *Pengertian Masyarakat menurut Para Ahli*, www.artikel.com/2015/06/para-ahli-pengertian-masyarakat, tanggal akses.27 November 2018

- e. Menurut Max Weber, Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

Dari beberapa pengertian parah ahli diatas, dapat diimpulkan bahwa masyarakat merupakan interaksi yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Serta terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patakon dalam berperilaku.

Pembangunan Desa dan pembangunan masyarakat Desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukkan pengertiannya. Padahal secara defenisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebut bahwa pembangunan masyarakat Desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kuliatas manusianya, sedangkan pembangunan Desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.²⁴

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan Desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial diarahkan kepada pemeretaan kesejahteraan penduduk Desa.

²⁴ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Garindo Perseda, 2015.h.240

- c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.²⁵

Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan, pemanfaatan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.²⁶

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material serta spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah,

²⁵ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h.242

²⁶ Rosfa Nur Azizah, *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi: UIN Raden Intang, 2017, h.30

hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, demokrasi, otonomi, partisipasi dan control bagi warga masyarakat.²⁷

Pembangunan Desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan Desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar Desa, Desa dalam Kecamatan, antar Kecamatan dan antar Kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan Desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah.²⁸

C. Kajian Empirik

Penelitian Hendryk. Dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Kaledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda”.²⁹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan sebelum Undang–Undang Desa disahkan. Sementara saat ini Undang–Undang Desa telah disahkan dan dalamnya diatur bahwa proses pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan

²⁷ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Garindo Perseda, 2015.h.243

²⁸ Ummi Nurul Hidayah, *Analisis Strategi Program Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)*. Skripsi UIN walisongo Semarang, 2018.h.42

²⁹ Hendryk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Kaledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota samarinda*, 2013.

pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya terletak pada *setting* penelitian saja, yaitu waktu dan tempat penelitian, lebih dari itu, penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri dibanding penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Kekhasan tersebut berkaitan dengan pembahasan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa, adanya pembagian bahasan dan tahap pembangunan Desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) serta digunakan Undang-Undang Desa Tahun 2014 yang telah disahkan dalam penelitian.

Penelitian Tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Polu Dogom Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa.

1. Dengan adanya partisipasi warga menekan pada partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga di Pulo Dogom Kecamatan Kualah hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara telah mengalihkan pengertian partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap kaum tersisih.

2. Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut, konsultasi dalam bentuk jasa, sumbangan spontan berupa uang barang sumbangan dalam bentuk kerja. biasanya

dilakukan oleh tenaga ahli setempat dan lain-lain. Sehingga pembangunan berjalan dengan baik.

Penelitian megawati. Yang dilakukan dalam bentuk disertasi di Universitas Padjadjaran dengan judul: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi kelurahan di kotamadya Jakarta Selatan), partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis, berbasis kemitraan antar pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan komunikator dan keunikan dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontribusi dan tanggung jawab dalam pembangunan.³⁰

D. Kerangka Fikir

Kultur budaya masyarakat di Indonesia yang selalu mendahulukan kepentingan bersama, menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam membangun Desanya. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dalam bentuk swadaya masyarakat adalah partisipasi secara fisik seperti tenaga dan dana maupun non fisik dalam bentuk pikiran/saran atau tanggapan bagi kepentingan pembangunan.

Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti keaktifan waktu, tenaga dan dana serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka peyumbangan ide bagi kepentingan pembangunan. Sebaliknya apabila masyarakat tidak memiliki

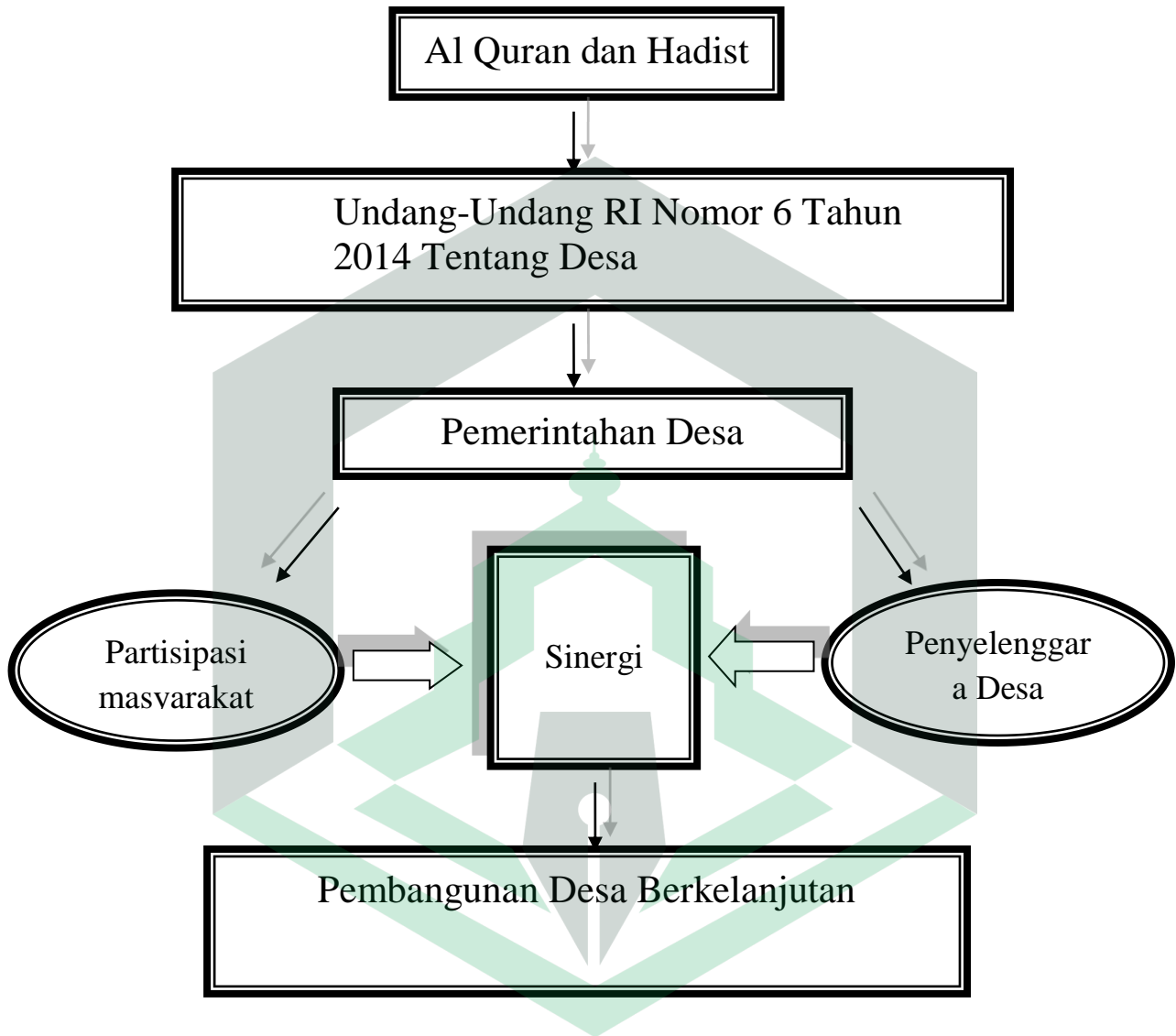
³⁰ Melis, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (studi di Desa Wawolesea Lasolo Kabupaten Konawe Utara)*. Skripsi Universitas Halu Oleo, 2016.h. 30-32

kesempatan secara personal karena sibuk oleh kegiatan individu, tenaga dan dana karena kemampuan finansial yang tidak memadai/kategori pendidikan miskin serta pendidikan dan pengetahuan yang rendah maka optimalisastuk.Untuk lebih jelasnya keterkaitan variabel dan sub-variabe dalam penelitian ini sebagaimana yang digambarkan pada bagan sebagai berikut.³¹



³¹ Wahyuddin, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. h.37-38

Gambar: 2.1. Kerangka pikir Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.³²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumen-dokumen, mengelolah kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam kata-kata dan bahasa.

Penelitian ini menggambarkan Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian bertempat di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

³² Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group 2018. h. 149

C. Subjek penelitian

Amirin mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³³ Untuk mendapatkan pemahaman tentang Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa Dandang selaku pemegang wewenang, aparat Desa dan masyarakat Desa Dandang yang sekiranya nanti dapat membantu peneliti dalam menggali data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang didapatkan melalui masyarakat atau dokumen. berupa data yang

³³ Muh. Fitrah dan luthfiyah, *Metodologi Penelitian ; Penelitian kualitatif , Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: Jejak, 2017. h. 152

berhubungan dengan Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau (pengamatan) interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan tempatnya.³⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data–data yang diperoleh dari Kantor Desa. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran tentang Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan–pertanyaan lisan kepada masyarakat, aparat Desa dan Kepala Desa. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan memberikan pertanyaan–pertanyaan yang terkait dengan Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat

³⁴ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Budi Utama 2018. h. 103

Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

c. Dokumentasi

Menurut sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi di masa kecil, di sekolah, ditempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Studio dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.³⁵

Sesuai dengan penjelasan tentang analisis data diatas, proses analisis data peneliti dilakukan dengan hasil wawancara langsung dengan informan serta catatan lapangan dan bahan lain. Setelah semua data terkumpulkan baru kemudian menyusun sesuai dengan data-data berkaitan dengan Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. Adapun data yang tidak terkait dengan pembahasan tersebut akan dipilih atau dijadikan penunjang penelitian yang membantu menjelaskan penelitian ini.

³⁵ Hengki Wijaya, *“Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi”*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018. h. 52

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Dandang sebelum Tahun 1993 merupakan daerah yang termasuk dalam lingkup wilayah desa buangin yang pada saat itu dipimpin oleh M. Jibu selaku kepala desa buangin. Selanjutnya pada tahun 1994 setelah dilaksanakannya pemekaran Desa Dandang menjadi sebuah Desa yang terdiri dari lima dusun yaitu,

- a. Dusun Dandang 1 (satu)
- b. Dusun Dandang II (Dua)
- c. Dusun Salu Ipo
- d. Dusun Salu Karondang
- e. Dusun Pangalli

Yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa adalah H. Muin. Saat ini yang menjabat Kepala Desa adalah Djahidin Patadari dibawah kepemimpinan beliau, Desa Dandang banyak mengalami perubahan diberbagai sektor baik Pendidikan, Pertanian, Sosial, Ekonomi Dan Keamanan. Saat ini Desa Dandang satelah memiliki lembaga pendidikan formal dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP hingga SMK serta pendidikan non formal berupa TPA. Diantara sekian

perubahan yang paling mencolok adalah perubahan dari sektor keamanan dulunya Desa Dandang terkenal sebagai desa yang rawan konflik Horizontal dan Vertical namun saat ini menjadi Desa yang kondusif dan aman.¹

2. Letak Geografis

Desa Dandang secara geografisnya terletak dibagian selatan Kecamatan Sabbang Selatan dengan luas wilayah 9,62 km², adapun teritorial batas wilayah Desa Dandang yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Buangin
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan: Desa Kampung Baru
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Buangin
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Pararra

Keadaan iklim di Desa Dandang terdiri dari musim hujan, musim kemarau dan pancarobah. Dimana musim hujan biasa terjadi antara bulan januari sampai dengan bulan April, sedangkan musim kemarau antara bulan Juli sampai dengan bulan November, dan musim pancaroba antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Kondisi geografis Desa Dandang memiliki ketinggian 350 M diatas permukaan laut, curah hujan 327 mm/Tahun, Topografi pengunungan dan pedalaman dan suhu udarah 32 C.²

¹ Pemerintah Desa Dandang, Profil Desa Dandang

² Pemerintah Desa Dandang, Profil Desa Dandang

3. Potensi Desa

a. Jumlah Penduduk

Desa Dandang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Jumlah penduduk Desa Dandang sampai dengan sampai dengan bulan Juli 2019 sebanyak 2.318 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran satu Desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan atau potensi pembangunan.³

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktifitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti dengan peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya penambahan jumlah penduduk membawa dampak negative, malahan menjadi positif jika dapat di berdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³ Pemerintah Desa Dandang, Pofil Desa Dandang

Tabel1.1 Jumlah Penduduk Desa Dandang Sesuai Dengan

Dusun/Lingkungan

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	L+P	
1	Dusun Dandang 1	223	222	445	120
2	Dusun Dandang 2	226	261	487	138
3	Dusun Salu Ipo	240	239	479	122
4	Dusun Salu Karondang	249	244	493	123
5	Dusun Pangalli	219	195	414	99
	Jumlah	1.157	1.161	2.318	602

Sumber: Profil Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan , Tanggal

3 Juli 2019

Berdasarkan jumlah penduduk menurut Dusun di Desa Dandang pada setiap wilayah dusun terbilang merata dimana jumlah total penduduk antara Dusun Dandang I, Dandang II, Salu Ipo, Salu Karondang dan Pangalli berjumlah hampir sama yaitu dengan total pada Dusun Dandang I sebanyak 445, Dandang II 487, Salu Ipo 479, Salu Karondang 493 dan Pangalli sebanyak 414.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah hal utama dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimana sumber daya manusia memberikan pengaruh yang begitu

besar pada perkembangan pemerintahan Desa. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan berpengaruh juga pada tingkat kecakapan masyarakat yang juga akan mempengaruhi kualitas individu, keterampilan, kewirausahaan, dan dapat membangun lapangan kerja baru bagi individu lainnya.⁴ Berikut ini rincian mengenai tingkat pendidikan Desa Dandang:

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dandang

Pra sekolah	SD	SMP	SMK	SI
5 %	40 %	25 %	20%	10 %
38 jiwa	481 jiwa	178 jiwa	107 jiwa	76 jiwa

Sumber: Profil Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan , Tanggal 3 Juli

2019

Berdasarkan data pada table diatas ,dapat dilihat hingga saat ini atau menurut data terakhir bahwa masyarakat di Desa Dandang dalam tingkat pendidikan , umumnya berada pada tingkat Sekolah Dasar dengan perolehan total sebanyak 481 jiwa, diikuti tingkat sekolah menengah pertama dengan jumlah 178 jiwa dan sekolah menengah kejuruan berjumlah 107. Sedangkan sarjana(SI) berjumlah 76 jiwa serta ditingkat pra sekolah hanya berjumlah 38 jiwa.

c. Pekerjaan

Profesi atau mata pencaharian dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas manusia untuk memperoleh hidup yang layak, dimana antara satu daerah yang

⁴ Pemerintah Desa Dandang, Profil Desa Dandang

lainnya selalu berbeda yang bedanya menyesuaikan dengan kemampuan penduduk.

Mata pencaharian sebagian besar warga Desa Dandang adalah petani dan buruh. Lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur memiliki luas sekitar 159 ha yang terbentang luas tersebar di setiap Dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat. Selain itu juga memanfaatkan lahan 5 ha untuk usaha perikanan.⁵

Tabel 1.3 Tingkat Pekerjaan Desa Dandang

Petani	Pedagang	Buruh	PNS
50 %	5 %	25 %	20 %
264 jiwa	9 jiwa	82 jiwa	39 jiwa

Sumber: Profil Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan , Tanggal 3 Juli 2019

Kondisi ketenaga kerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya, pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja dimana masyarakat yang mencari kerja tidak dapat terserap sepenuhnya pada lapangan kerja yang tersedia khususnya di sektor pemerintahan atau sektor swasta/perusahaan karena memang daya serap dari sektor tersebut sangatlah

⁵ Pemerintah Desa Dandang, Profil Desa Dandang

terbatas, sehingga sebagai katup pengaman masyarakat harus dikembangkan dan diberdayakan melalui usaha kerja mandiri/wirausaha.

d. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk Desa Dandang terdiri dari tiga kepercayaan yaitu Islam, Kristen, Khatolik. Namun mayoritas penganutnya lebih dominan agama Islam sebanyak 1.955. Adapun dapat dilihat pada table berikut.⁶

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	ISLAM	958	997	1.955
2	KRISTEN	178	165	343
3	KHATOLIK	14	15	29
4	HINDU	-	-	-
5	BUDDHA	-	-	-

Sumber: Profil Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan , Tanggal 3 Juli

2019

e. Sarana dan Prasarana

Penggunaan Tanah di Desa Dandang sebagian besar di peruntukkan untuk pembangunan sedangkan sisahnya untuk tanah pertanian berupa sawah dan perkebunan. Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting

⁶ Pemerintah Desa Dandang, Profil Desa Dandang

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan, ditambah lagi dengan membantu perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat tidak terkecuali pemerintahan Desa Dandang, sebab tanpa adanya sarana dan prasarana tentunya mustahil masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk menunjang kehidupannya.⁷

Tabel 1.5 Sarana Dan Prasarana Desa Dandang

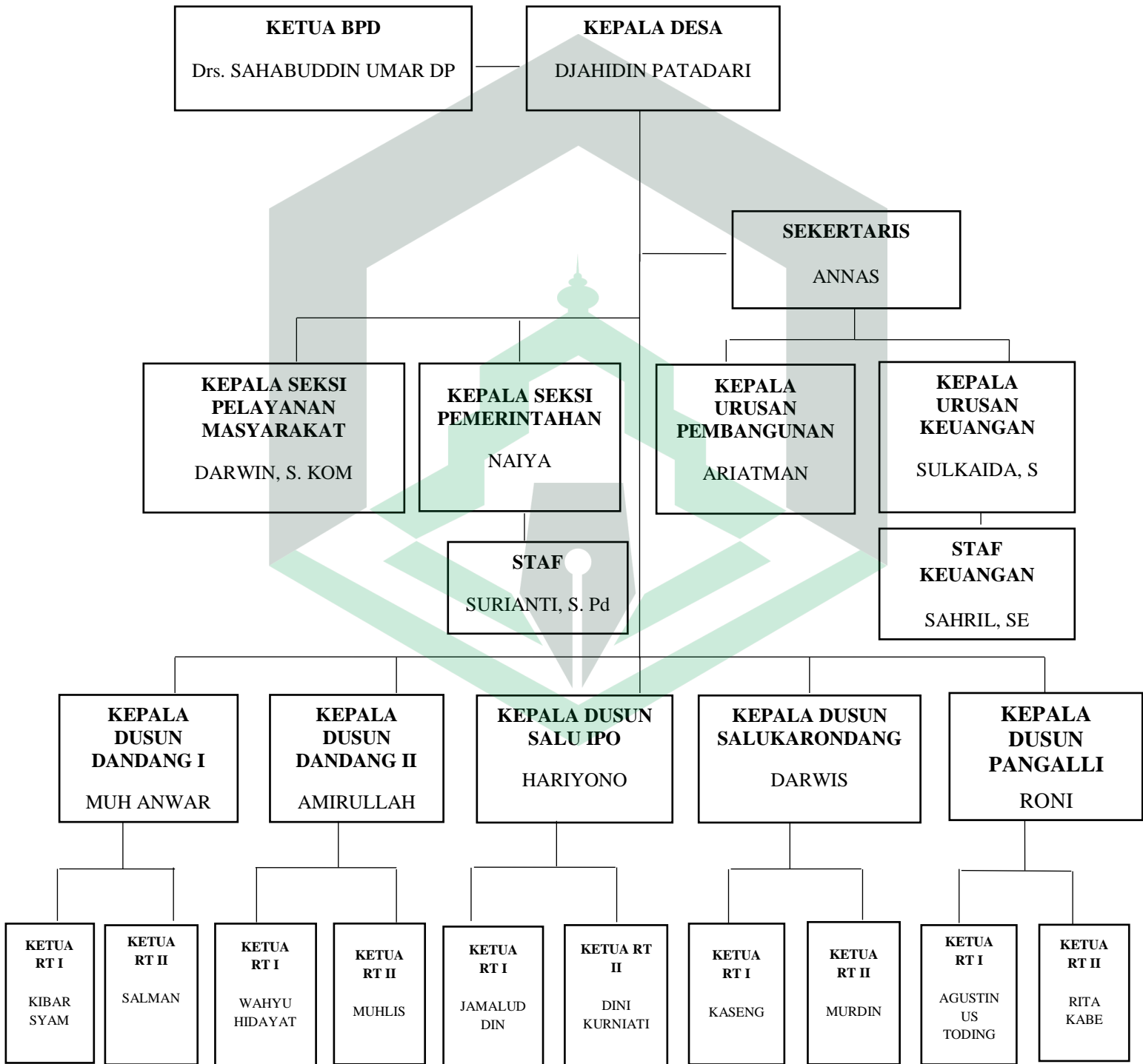
No	Jenis sarana dan prasarana	Keterangan
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Pustu	1 Unit
3	Mesjid	4 Unit
4	TK	2 Unit
5	SD	1 Unit
6	SMP	1 Unit
7	SMK	1 Unit
8	Gereja	1 Unit
9	Lapangan Bola	1 Unit
10	Jalan Tani	500 Meter
11	Posyandu	5 Unit

Sumber: Profil Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan , Tanggal 3

Juli 2019

⁷ Pemerintah Desa Dandang, Profil Desa Dandang

Tabel 1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dandang



4. visi dan Misi Desa Dandang

a. visi

Mewujudkan Desa Dandang yang aman dan tentram berlandaskan kesadaran masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat.⁸

b. Misi

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
2. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat
3. Menciptakan iklim kondusif
4. Pemberdayaan kelembagaan

B. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber dana Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

⁸ Pemerintah Desa Dandang, Profil Desa Dandang

Desa. Perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.⁹

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁰

Pemerintah Desa sangatlah membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan pembangunan di Desa. Sehingga sangatlah dibutuhkan strategi yang baik dan benar untuk menumbuhkan kebanggaan pemikiran dan keinginan masyarakat untuk terus aktif dan ikut serta dalam pembangunan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat maka Pemerintah Desa menyiapkan strategi yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara membangun komitmen bersama dengan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang dilakukan Pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau pendapat masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat.

Membangun kepercayaan diri dari masyarakat adalah langkah yang efektif, karena dengan rasa percaya masyarakat dengan Pemerintah dapat memicu keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di Desa. Pemerintah merupakan suatu organ yang

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Desa

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

bertanggung jawab atas keharmonisan kehidupan masyarakat sehingga cara dari Pemerintah Desa yang mana dengan melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat.

Keberhasilan dalam suatu pembangunan di masyarakat seringkali di pengaruhi oleh tipikal dari seorang pemimpin. Karakter dari seorang pemimpin sangatlah berpengaruh pada masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan selalu dihubungkan dengan keaktifan aparat Pemerintah dalam proses pembangunan. Artinya bahwa dalam proses pembangunan keterlibatan aktif dari aparat Pemerintah merupakan salah satu penilaian masyarakat dalam suatu Desa. Hal ini sejalan dengan wawancara Kepala Desa Dandang ia mengatakan bahwa:

“sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan ke makmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.”¹¹

Apa bilah pembangunan dilaksanakan di wilayah pedesaan, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat pedesaanlah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan. Hal tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

¹¹ Patadari Djahidin, Kepala Desa Dandang, *Wawancara*, Kediaman Bapak Kepala Desa Dandang, tanggal 23 juli 2019

Terjemahnya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹²

Ayat ini menjelaskan tentang pembangunan ini adalah mengenai bagaimana kita membangun Desa dalam hal gotong royong dan tolong menolong, yang sangat dianjurkan dalam islam, karena dengan tolong menolong dan gotong royong maka pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah.

Karena meningkatkan pembangunan, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan Pemerintah desa sendiri. Menyingung perihal peran dari suatu kinerja, hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas. Kualitas dari tugas pemerintah desa yang dimaksud disini adalah sejauh mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat.

Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan*. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2014, hal. 106

Men bahasan mengenai bagaimana dan seperti apa aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, maka hal ini tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan dalam bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan suatu program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana Desa. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan bapak Drs. Sahabuddin Umar Dp ketua BPD Desa Dandang ia mengatakan bahwa:

“pembangunan dalam satu Desa salah satu upaya membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian dan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan bagi masyarakat”¹³

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD Desa Dandang bapak Drs. Sahabuddin Umar Dp menjelaskan pembangunan adalah upaya membantu masyarakat, artinya membantu masyarakat dalam perekonomian dan kemudian menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat.

Adapun beberapa pembangunan yang berkembang di Desa Dandang yang cukup nampak atas partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Sektor Pendidikan

Dampak dari tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan terlihat dari penurunan jumlah anak usia putus sekolah pada tahun 2018 berjumlah 150 orang sedangkan di tahun 2019 ini berjumlah 140 orang.

2. Sektor kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dua tahun terakhir di dukung antara lain:

a. Penyediaan tenaga kesehatan (Bidan Desa)

¹³ Drs. Sahabuddin Umar DP, Ketua BPD Desa Dandang, *Wawancara*, Kediaman Bapak Drs. Sahabuddin Umar DP, tanggal 26 juli 2019

- b. Pustu (1 Unit)
 - c. Posyandu (2 Unit)
 - d. Dokter praktek
 - e. Pembinaan kesehatan masyarakat
3. Sektor olahraga

Pemerintah Desa Dandang dengan membangun lapangan sepak bola ini bertujuan untuk mengajak masyarakat khususnya di kalangan pemuda Desa Dandang untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lapangan tersebut dan dengan adanya hal seperti ini hubungan Pemerintah dengan masyarakat Desa Dandang khususnya di kalangan pemuda semakin baik.

C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat

Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan juga alat, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Kemimpinan Pemerintah Desa merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan Desa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi Pemerintah juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan Desa semakin maju tanpa adanya dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar terciptanya suasana yang kondusif dan harmoni sehingga tujuan dan cita-cita untuk mejadikan Desa semakin baik akan bisa terwujud. Hal

ini sejalan dengan wawancara dengan bapak Djahidin Patadari selaku kepala Desa Dandang ia mengatakan bahwa:

“untuk menjadikan Desa semakin maju dan berkembang Pemerintah dan masyarakat dalam suatu Desa harus berjalan secara seiring dan sejalan sehingga menjadikan Desa semakin baik.”¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Djahidin Patadari selaku kepala Desa Dandang salah satu bentuk upaya seorang Pemerintah suatu daerah dalam mewujudkan tujuan tercapainya cita-cita suatu Desa untuk menjadikan Desa semakin baik.

Keberhasilan dari meningkatkan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari namanya rasa kebersamaan antara semua unsur terkait demi mencapai tujuan hidup bersama. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat itu berjalan dengan baik.

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan pemerintah Desa Dandang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa Dandang dalam hal ini melakukan pembinaan kepada masyarakat, dalam melakukan pembinaan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan LPM saling berkordinasi untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Pembinaan masyarakat Desa merupakan salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan serta mengelolah lembaga dan sumber daya manusia agar bekerja lebih baik dan sesuai dengan harapan.

¹⁴ Patadari Djahidin, Kepala Desa Dandang, *Wawancara*, Kediaman Bapak Kepala Desa Dandang, tanggal 23 juli 2019

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , menyebutkan Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Pemerintah Desa Dandang dan lembaga yang terkait termasuk masyarakat untuk ikut serta dalam berpartisipasi seperti dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara gotong royon, tujuannya agar masyarakat dalam hal ini sebagai pengontrol kualitas pembangunan.

Pemerintah Desa Dandang dalam hal ini berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh pemuda, tokoh masyarakat, BPD, dan tokoh agama dalam hal meningkatkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam pemerintahan, seperti dalam pembangunan yang ada di Desa dandang. Hal ini sejalan dengan wawancara suparman sebagai tokoh masyarakat di Desa dandang dikatakan bahwa:

“Melakukan pendekatan kepada pemuda, masyarakat dan selalu melakukan musyawarah dan kemudian juga di setiap 2 minggu mengadakan rapat untuk membahas hal-hal yang terjadi di desa Dandang yang perlu kita benahi.”¹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, Pemerintah Desa Dandang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan khususnya kepada masyarakat serta selalu melakukan musyawarah Desa. Dan kemudian juga di setiap 2 minggu Pemerintah Desa Dandang dalam hal ini sering

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

¹⁶ Suparman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kediaman Bapak Suparman, tanggal 28 juli 2019

mengadakan rapat untuk membahas hal-hal apa yang perlu di benahi. Dengan sering melakukan komunikasi dan mengadakan rapat dalam 2 minggu sekali dengan masyarakat langkah ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dandang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di sektor pembangunan:

1. Pembangunan sektor Jalan dan Jembatan

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa pada tahun 2018, Pemerintah Desa Dandang telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan Jembatan, dan pembangunan jalan di Dusun-Dusun.

Dalam wawancara dengan Bapak Ariatman kepala urusan pembangunan Desa Dandang dikatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa Dandang di Dusun-Dusun diharapkan dapat mempermudah jalannya Perekonomian di Desa Dandang.”¹⁷

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Dandang, pastinya berdasarkan apa yang terjadi usulan dari setiap masyarakat. Hal ini di maksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dandang benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2. Pembangunan Pos Posyandu

Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Dandang guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat

¹⁷ Ariatman, Kepala Urusan Pembangunan Desa Dandang, *Wawancara*, Kediaman Bapak Ariatman, tanggal 28 juli 2019

dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

3. Pembangunan Rumah Ibadah

Pemerintah Desa Dandang dalam hal ini sarana dan prasarana yang cukup memadai khususnya dalam hal pembangunan rumah ibadah yang terdapat Mesjid yang terdiri dari 4 unit dan Gereja 1 unit. Adapun lebih banyak pembangunan Mesjid dari pada Gereja hal ini dikarenakan masyarakat Desa Dandang mayoritas Islam.

4. Pembangunan Gedung Sekolah

Pemerintah Desa Dandang dalam hal ini membangun gedung sekolah guna membantu masyarakat dalam sektor pendidikan. Dengan adanya gedung sekolah seperti SD, SMP, dan SMK hal ini sangat membantu masyarakat dalam biaya pendidikan di usia dari sekolah dasar samapai menengah keatas.

D. Tinjauan Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial karena islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial. Pemberdayaan dalam kontes pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada

masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala tantangan zaman, islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan krakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembngunan atau pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat kepada manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al anfal Ayat 53:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemhahnya:

“sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah di anugrakkannya suatu kaum, hingah kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri.”¹⁸

Sama halnya seperi penjelasan Q.S Al Anfaal ayat 53 bahwa sanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia untuk merubahnya sendiri. Manusia yang akan merubah dan berusaha akan dimudahkan allah dalam segala urusannya.

Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimaanfatkan oleh masyarakat dan menolak

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan*, hal. 184

apa-apa yang berbahaya berteraskan dalam nilai-nilai Islam Muhammad akhir dan Halyani mengatakan definisi pembangunan ialah pembangunan Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebijakan ummat Islam dari semua aspek (kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai kemasalhatan dan kedamaian hidup didunia dan diakhirat. Definisi pembangunan, mewujudkan kehidupan yang tentram dan sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia.

Konsep pembangunan dalam Islam ialah sebagai berikut:

1. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama
3. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat

Adanya pembangunan dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemasalhatan dalam segi ekonomi dan sosial. Pembangunan Desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat Desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Apa bila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembanguna tersebut mengalami dampak positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Dandang untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya beberapa sektor

pembangunan di Desa Dandang yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan bapak Djahidin Patadari selaku Kepala Desa Dandang ia mengatakan bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya, seperti ketika misalkan Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau relisasi terhadap kebutuhan mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan.”¹⁹

Berdasarkan wawancara tersebut pembangunan yang berlangsung di Desa Dandang dalam hal ini meningkatkan kemandirian masyarakat dan ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.

Sebagaimana kita tahu, Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua benua. Menjadikan Negara tersebut memiliki keanekaragaman suku dan budaya, pembangunan di Indonesia sebenarnya sudah meningkat setiap tahunnya, namun sayangnya belum merata di setiap Daerah. Salah satu penyelesaian yang mungkin dilakukan adalah membangun dengan mengutamakan kearifan lokal.

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengelolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian sendiri tentunya menyesuaikan dengan

¹⁹ Patadari Djahidin, Kepala Desa Dandang, *Wawancara*, Kediaman Bapak Kepala Desa Dandang, tanggal 23 juli 2019

pandangan hidup dengan masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal masyarakat sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman prasejarah hingga saat ini, kearifan lokal perilaku positif manusia dalam berhubungan dalam alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat. Hal ini sejalan dengan wawancara bapak Djahidin Patadari selaku Kepala Desa Dandang ia mengatakan bahwa:

“kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi yang dilakukan sekelompok masyarakat secara turun-menurun yang hingga saat ini masih di pertahankan keberadaannya oleh masyarakat”²⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Djahidin Patadari selaku kepala Desa Dandang tentang penjelasan mengenai kearifan lokal dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yaitu adat, kebiasaan, sekelompok masyarakat yang mentradisi dikalangan masyarakat.

Pembangunan sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan pembanharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relative cepat. Berbagai pembanharuan yang telah dilakukan membawa kita pada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan sarana komunikasi. Akan tetapi pembangunan yang berdasar pada kecanggihan teknologi dan pertumbuhan ekonomi justru menciptakan jiwa gotong royong dalam diri

²⁰ Patadari Djahidin, Kepala Desa Dandang, *Wawancara*, Kediaman Bapak Kepala Desa Dandang, tanggal 23 juli 2019

masyarakat. Kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan dalam masyarakat harus beriringan dengan kearifan lokal yang ada, seperti di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Pemerintah Desa memiliki ciri khas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yaitu budaya Kesaroh. Budaya Kesaroh ini menfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Model ini sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan berbasis masyarakat serta menciptakan pembangunan partisipatif.

Secara umum, budaya kesaroh ini sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didorong keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan cara dikerjakan bersama. Dengan demikian pemerintahan dapat berhasil karena memadukan aspek pembinaan masyarakat dan aspek pengelolaan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Pemerintah Desa Dandang memberi semangat kepada seluruh warga Desa untuk mencitai Desa melalui Kesaroh. Pemerintah Desa Dandang dalam hal ini memanfaatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan wawancara bapak Djahidin Patadari selaku kepala Desa Dandang ia mengatakan bahwa:

“Beberapa pembangunan di Desa Dandang sebagian besar di pengaruhi oleh masyarakat yang turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa melalui Kesaroh.”²¹

Berdasarkan wawancara tersebut kearifan lokal yang ada pada Desa Dandang berdampak pada pembangunan hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau masih tingginya rasa jiwa kebersamaan dalam setiap kegiatan pembangunan.

Adapun beberapa fungsi dari kearifan lokal antara lain sebagai berikut:

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia
3. Kearifan lokal berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4. Kearifan lokal berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Dandang ia mengatakan bahwa:

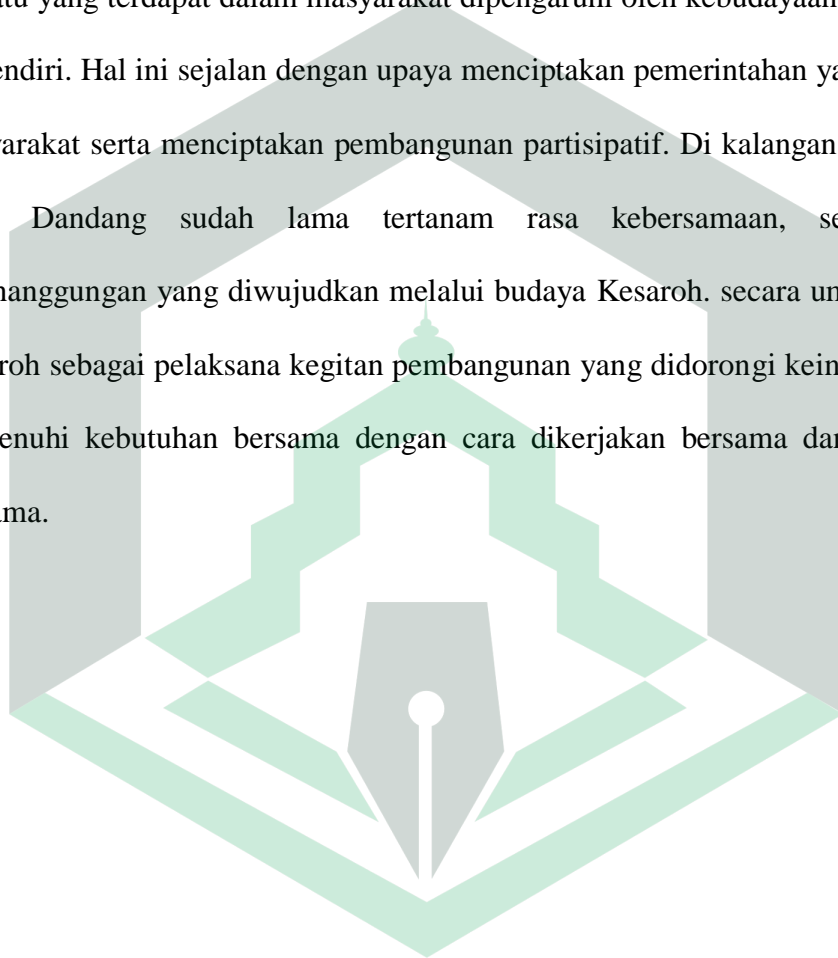
“Berpendang bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya, yang hidup dalam masyarakat”²²

²¹ Patadari Djahidin, Kepala Desa Dandang, *Wawancara*, Kediaman Bapak Kepala Desa Dandang, tanggal 23 juli 2019

²² Suparman, Tokoh Masyarakat Desa Dandang, *Wawancara*, Kediaman Bapak Suparman, tanggal 28 juli 2019

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suparman selaku tokoh masyarakat Desa Dandang mengenai kearifan lokal dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yaitu budaya, sikap dan tindakan hidup dalam masyarakat.

Kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang berbasis masyarakat serta menciptakan pembangunan partisipatif. Di kalangan masyarakat Desa Dandang sudah lama tertanam rasa kebersamaan, senasib dan sepenanggungan yang diwujudkan melalui budaya Kesaroh. secara umum budaya Kesaroh sebagai pelaksana kegiatan pembangunan yang didorongi keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan cara dikerjakan bersama dan dipelihara bersama.



BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari judul penelitian “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal” maka di tarik kesimpulan dari beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang cukup baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa dalam hal ini membangun komitmen bersama masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang dilakukan Pemerintah, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau pendapat masyarakat terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat. Membangun kepercayaan diri dari masyarakat adalah langka yang efektif, karena dengan rasa percaya masyarakat dengan Pemerintah dapat memicu keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di Desa. Pemerintah merupakan suatu organ yang bertanggung jawab atas keharmonisan kehidupan masyarakat sehingga cara dari Pemerintah Desa yang dengan melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat, dalam

melakukan pembinaan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan LPM saling berkordinasi untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Pembinaan masyarakat Desa merupakan salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan serta mengelolah lembaga dan sumber daya manusia agar bekerja lebih baik dan sesuai dengan harapan.

3. Tinjauan hukum Islam dan Kearifan lokal terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan memberikan dampak yang positif karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Dandang baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan yang dikatakan memberikan kemaslahatan apa bila masyarakat merasakan-merasakan perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat seperti pekerja kantor, swasta, pedagang dan petani memang merasakan dampak positif dari pembangunan sarana dan prasarana karena mereka lebih mudah menggunakan akses jalan dalam melintasi untuk bekerja.

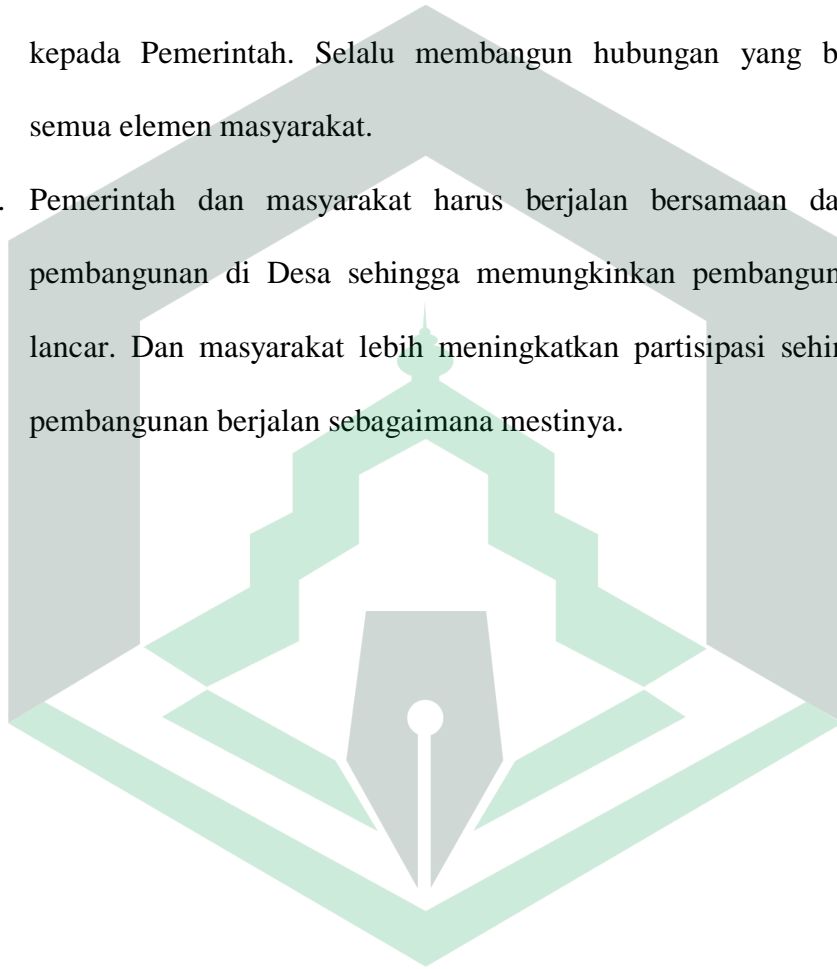
B. Saran

Saran merupakan bentuk pertanggung jawaban penulis untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Pemerintah lebih memantapkan diri sebagai pemegang kendali dalam membangun sehingga kepercayaan dari masyarakat itu tetap ada. Dan menjaga kepercayaan yang masyarakat berikan sebagai pemegang kendali dalam setiap pembangunan. Perlunya ada transparansi dari Pemerintah

dalam melaksanakan pemerintahan untuk menjadikan pola pikir masyarakat kearah positif dan tidak berfikir negatif kepada Pemerintah.

2. Pemerintah menyiapkan langkah-langakah atau cara-cara lain untuk mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Memberikan ruang yang besar untuk masyarakat dalam memberikan pendapat ataupun kritikan kepada Pemerintah. Selalu membangun hubungan yang baik dengan semua elemen masyarakat.
3. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersamaan dalam proses pembangunan di Desa sehingga memungkinkan pembangunan berjalan lancar. Dan masyarakat lebih meningkatkan partisipasi sehingga proses pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan*. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2014.
- Dr. Patta Rappanna, S.E, M.Si., *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Makassar: SAH MEDIA, 2016).
- Effendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: prenadamedia Group 2018.
- Fitrah, Muh. Dan Luthfiah. *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat:Jejak,2017.
- Firdaus dan Zamzam Fakhry, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Budi Utama 2018.
- Hartoyo, dkk. *Buku Materi Pokok Konsep Pembangunan Masyarakat Desa, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1996.*
- Hendryk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemabngunan Dikelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*, 2013.
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018.
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana,2015).
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.1990
- Nurman, *Srategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Garindo Perseda, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, (Balai Pustaka: Jakarta 2007).
- Poerwardaminta,W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1991.
- Theresia, Aprillia dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2008.
- Yuwono, Teguh. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Iyapps Diponegoro University. 2001

Jurnal dan Skripsi :

- Azizah, Nur Rosfa, “*Srategi Optimalisasi Pembangunan Infastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*,” Skripsi: UIN Raden Intang, 2017.
- Dwi, Martina Rahayu, berjudul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Kampung Tengah*”. Skripsi Universitas Lampung, 2018.
- Hidayah, Nurul Ummi. *Analisis Strategi Pogram Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak)*. Skripsi UIN walisongo Semarang, 2018.
- Kurniawan, Bagus Aditya. “*Upaya Pemmerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandu Kecamatan Sangkulirang kabupaten Kutai Timur*”. Jurnal Administrasi Negara, Vol.3, No.5.2015
- Melis, berjudul “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (studi di Desa Wawolesea Lasolo Kabupaten Konawe Utara)*” . Skripsi Universitas Halu Oleo, 2016.
- Muh. Fitrah dan luthfiah, *Metodologi Penelitian ; Penelitian kualitatif , Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Jawa Barat: Jejak, 2017.*
- Nugroho Ridho Mochammad, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016
- Septyasa, Nuring, Laksan, “*Bentuk- bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta*”. Kebijakan dan Manejemen Publik, Vol.1 No.1. 2018.
- Saputra, Eka Yudhiansyah. “*Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*”, (Kasus: Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau). Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2016.
- Tanuwijaya, Fransiska. “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya*”, Jurnal kebijakan dan Menejemen Publik, Vol.4 No.2.2018.

Wahyuddin, berjudul "*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*". Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Wulandari Sri.S, berjudul "*Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*". Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017

Wayati, berjudul, "*Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna*". Skripsi Universitas Haluoleo, Tahun 2016.

Artikel :

Artikel Siana, *Pengertian Masyarakat menurut Parah Ahli*, www.artikel.com/2015/06 para-ahli-pengertian-masyarakat, tanggal akses. 27 November 2018

Peraturan Undang-Undang :

- Republik Indonesia, Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa Dandang



Wawancara dengan Ketua BPD
Desa Dandang





Wawancara dengan Kepala Kaur
Pembangunan Desa Dandang



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat
Desa Dandang



Gambar Gotong Royong (Kesaroh) Masyarakat Desa Dandang

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Alamat :

Jabatan :

Menerapkan bahwa,

Nama : M. Firmansyah

Nim : 15.03.02.0042

Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan judul : “Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal” (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara).

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dandang, 23 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

M. FIRMANSYAH

NIM : 15.03.02.0042

RIWAYAT HIDUP



M. FIRMANSYAH, dilahirkan pada tanggal 03 Juni 1997 di Dusun Monto Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda M. Suprin AR dan ibunda Minaria Penulis memiliki kakak perempuan dan adik perempuan yang bernama

Nur Hidayati, S.pd dan Nur Waqia.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 021 Monto di Desa Tulak Tallu pada Tahun (2003-2009). Sekolah menengah pertama di SMPN 3 Sabbang pada Tahun (2009-2012). Dan Sekolah menengah Atas di SMAN 3 Luwu Utara pada Tahun (2012-2015).

Pada tahun 2015 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo, dan berhasil diterima sebagai Mahasiswa pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Pada akhirnya penulis menyusun dan menulis skripsi dengan judul **"Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal"** (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara). Sebagai satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata (S1) dan memperoleh gelar pendidikan Sarjana Hukum (SH).